

**UPAYA INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION
(ITTO) DALAM MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
INDONESIA TAHUN 2019-2022**

(Skripsi)

Oleh

SALSABILA

NPM 1816071062



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**UPAYA INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION
(ITTO) DALAM MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
INDONESIA TAHUN 2019-2022**

Oleh

SALSABILA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

UPAYA INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION (ITTO) DALAM MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA TAHUN 2019-2022

Oleh

SALSABILA

Penelitian ini memberikan analisa dan penjelasan terkait upaya International Tropical Timber Organization (ITTO) sebagai organisasi internasional antarpemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2019-2022 melalui pelaksanaan proyek kerja sama peningkatan kapasitas manajemen kebakaran hutan. Pelaksanaan kerja sama ini dilatarbelakangi oleh peristiwa karhutla masif yang dialami Indonesia pada tahun 2015 dan 2019 yang berdampak negatif di berbagai bidang terutama lingkungan secara global.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dimana penulis berupaya untuk mendeskripsikan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh para aktor. Analisis ini juga mengaplikasikan teori neoliberal institusionalisme untuk menganalisis upaya organisasi internasional dalam kerja sama yaitu ITTO yang menjalankan fungsinya dalam membantu Indonesia memenuhi kepentingannya untuk mencegah isu kebakaran hutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ITTO menjalankan fungsi-fungsinya sebagai organisasi dengan memberikan bantuan kepada Indonesia melalui pembentukan ketentuan kerja sama melalui PLTB dan pelatihan Manggala Agni, memastikan proses kerja sama berjalan sesuai kesepakatan dengan melakukan supervisi, menyediakan informasi berupa panduan dalam menjalankan kerja sama, menggelar rapat pertemuan PSC untuk mengevaluasi kerja sama dan forum webinar regional, serta mengalokasikan dana untuk memfasilitasi kegiatan kerja sama. Kerja sama ini berdampak positif pada pengurangan area lahan terbakar dan upaya pencegahan karhutla di Indonesia.

Kata kunci: karhutla, ITTO, neoliberal institusionalisme, fungsi, upaya

ABSTRACT

THE EFFORTS OF INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION (ITTO) IN PREVENTING FOREST AND LAND FIRES IN INDONESIA, 2019-2022

By

SALSABILA

This research provides an explanation regarding the effort of the International Tropical Timber Organization (ITTO) as an international intergovernmental organization in preventing forest and land fires in Indonesia from 2019 to 2022, through the implementation of collaborative project to build forests and land fires management capacity. This cooperation was motivated by the massive forest and land fire events experienced by Indonesia in 2015 and 2019 which had a negative impact in various fields, especially the global environment. The descriptive qualitative methods are used to describe activities and programs as an effort to prevent forest and land fires. This research also applied neoliberal institutionalism theory to analyze the effort of international organization functions in cooperation namely ITTO in assisting Indonesia to fulfill its national interests in overcoming the issue of forest and land fires. The research results show that ITTO provides a significant help for Indonesia through capacity building program which contain a few agendas such as creates rules and terms regarding the implementation of zero burning practice and training for Manggala Agni, ensures the cooperation process complies the rules through supervision, provides information in the form of guidance in carrying out the cooperation, holding project steering committee meetings and regional webinar. This collaboration has positive impacts on reducing the burnt area of forest and land and also improves the capacity to prevent forest and land fires in Indonesia.

Keyword: forest and land fires, ITTO, neoliberal institutionalism, function, efforts

Judul Skripsi : **UPAYA INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION (ITTO)
DALAM MENCEGAH KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2019-2022**

Nama Mahasiswa : **Salsabila**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816071062**

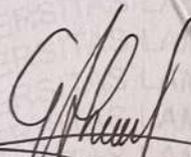
Jurusan : **Hubungan Internasional**

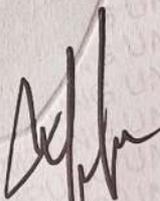
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



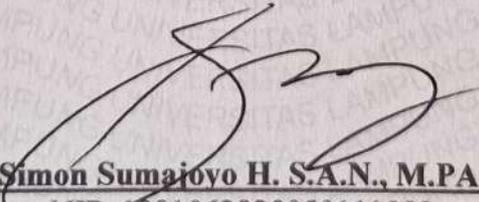
MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Gita Karisma, S.IP., M.A.
NIP. 198701282014042001


Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.
NIP. 199209262023212049

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**


Simon Sumajoyo H. S.A.N., M.PA.
NIP. 1981062820050111003

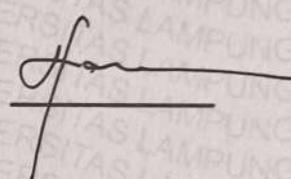
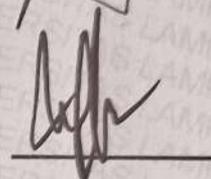
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Gita Karisma, S.IP., M.A.**

Sekretaris : **Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**

Penguji Utama : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **11 Juli 2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 11 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Salsabila
NPM. 1816071062

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandarlampung pada tanggal 16 April 2000 dari bapak Aji Riadi, A.Md. dan ibu Nurlela sebagai anak perempuan pertama dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal pertama di TK dan SDS Al-Kautsar Bandarlampung dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke tingkat menengah pertama di SMP Negeri 22 Bandarlampung dan lulus pada tahun 2015 dan SMA Negeri 14 Bandarlampung dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya, penulis diterima sebagai mahasiswi di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui seleksi jalur tes atau SBMPTN pada tahun 2018.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis berkesempatan mengikuti ajang internasional *International Conference on Political, Social, and Humanities Sciences (ICPSH)* dan menerbitkan artikel berjudul “*Food Security In COVID-19: India's Tremendous Pressure And Its Impact In South Asia*” bersama rekan-rekan lain pada tahun 2020. Penulis juga aktif menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (PHMJ-HI) Universitas Lampung pada periode 2020/2021 sebagai bendahara. Penulis juga melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung selama kurang lebih 3 bulan pada Agustus-September tahun 2021.

MOTTO

“The sun’ll come out, nothing good ever comes easy, I know times are rough but winners don’t quit, so don’t you give up”

(Karly Marina Loaiza and Tyler Gregory Okonma)

“I dare say that I could reach this point because I was lucky, but luck is just another name for hard work and the harder you work the luckier you get”

(Salsabila)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, Bapak Aji Riadi dan Ibu Nurlela yang selalu memberikan dukungan dan doa agar saya dapat menyelesaikan studi saya hingga akhir perkuliahan dengan baik.

Adik saya, Fadia Haya yang selalu setia mendengarkan keluhan dan keresahan serta memberikan semangat dalam menjalani proses perkuliahan.

Teman seperjuangan selama kuliah, Tisa, Yayak, Ajeng dan Eta yang telah menemani perjalanan saya sebagai mahasiswi dan memberikan motivasi dalam selama proses tersebut.

Diriku sendiri, yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan dan menjalankan masa perkuliahan dari awal hingga akhir. Terima kasih atas jerih payah yang telah diberikan terlepas dari segala kendala yang telah dihadapi.

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat, hidayah serta anugerah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Upaya International Tropical Timber Organization (ITTO) dalam Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 2019-2022” dapat diselesaikan sebagai prasyarat menyelesaikan Program Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bimbingan, bantuan, dukungan, dan nasihat dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung
4. Ibu Gita Karisma, S. IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan serta wawasan dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Ibu Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A. selalu Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak arahan dan saran dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembahas yang senantiasa memberikan kritik dan masukan yang membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Tety Rachmawati, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Para dosen Jurusan Hubungan Internasional yang tidak bisa satu-persatu disebutkan yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran berharga untuk penulis selama masa perkuliahan.

9. Kedua orang tua saya, Bapak Aji Riadi dan Ibu Nurlela. Terima kasih Umi dan Abi karena selalu percaya, tidak pernah lelah mencurahkan doa dan dukungan, tidak pernah memberikan tekanan dan selalu bersabar menunggu Salsa untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswi termasuk dalam pengerjaan skripsi.
10. Adik saya, Fadia Haya terima kasih karena selalu sedia mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat dan menemani segala proses pengerjaan skripsi.
11. Teman-teman semasa sekolah, BBG dan *Kulkits*. Terima kasih Nadia dan Vadia yang tidak pernah bosan menanyakan progres skripsi penulis, juga Antika, Ade dan Laras yang telah menjadi sumber motivasi bagi penulis.
12. Teman-teman seperjuangan, *Blackvelvet*. Terima kasih Tisa, Yayak, Ajeng dan Eta yang selalu menerima dan menemani penulis semasa perkuliahan dan bahkan di luar periode tersebut, serta berperan sebagai pemandu sorak personal yang mempercayai penulis melebihi dirinya sendiri
13. Teman-teman semasa kuliah, *Jomblo Fisabilillah* yang selalu menjadi pengingat serta pendukung setia yang kehadirannya sangat bernilai bagi penulis selama perkuliahan.
14. Teman-teman jurusan HI 2018 yang tidak penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih telah berbagi pengalaman sebagai sesama mahasiswa HI di Unila.

Bandarlampung, Juli 2024

Penulis

Salsabila

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Konsep/Teori	16
2.2.1 Neoliberal Institusionalisme	16
2.3 Kerangka Pemikiran	19
III. METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Fokus Penelitian	22
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5 Teknik Analisis Data	24
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Kondisi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia.....	26
4.2 Upaya ITTO dalam Pencegahan Karhutla di Indonesia	30
4.2.1 ITTO dalam Menjalankan Fungsi Rule Creation	34
4.2.2 ITTO dalam Menjalankan Fungsi Rule Supervision	38
4.2.3 ITTO dalam Menjalankan Fungsi Informasional	41

4.2.4 ITTO dalam Menjalankan Fungsi Forum	44
4.2.5 ITTO dalam menjalankan Fungsi Operasional	50
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pelaksanaan Pelatihan Praktik PLTB.....	38
2. Pelatihan Penanggulangan Karhutla Manggala Agni	40
3. Luas Area Terbakar di Lokasi Kerja Sama	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Luas Area Karhutla Indonesia 2015-2022.....	3
2. Bagan Kerangka Pemikiran.....	20
3. <i>Kick-off Meeting</i>	32
4. Luas Area Hutan dan Lahan di 3 Provinsi Kerja Sama	33
5. Prosedur Pemadaman Kebakaran	42
6. Pertemuan Evaluasi ITTO-Indonesia.....	46
7. Kesepakatan ITTO dan RFMRC-SEA.....	48
8. Penyediaan Fasilitas Keselamatan oleh ITTO.....	51
9. Hasil Pelatihan PLTB.....	54
10. MoU Indonesia dengan Lembaga Lokal dan Sektor Swasta	62

DAFTAR SINGKATAN

AATHP	: <i>ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
CIFOR	: <i>Center for International Forestry Research</i>
CO ₂	: Karbon dioksida
CH ₄	: Metana
COP	: <i>Conference of the Parties</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
IGO	: <i>Intergovernmental Organization</i>
ITTO	: <i>International Tropical Timber Organization</i>
Karhutla	: Kebakaran hutan dan lahan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PLTB	: Pembukaan Lahan Tanpa Pembakaran
RFMRC-SEA	: <i>Regional Fire Management Resource Center-South East Asia</i>
SFM	: <i>Sustainable Forest Management</i>
SDG	: <i>Sustainable Development Goals</i>
UNCTAD	: <i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
UNEP	: <i>United Nations Environment Programme</i>
UNFCCC	: <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>

I. PENDAHULUAN

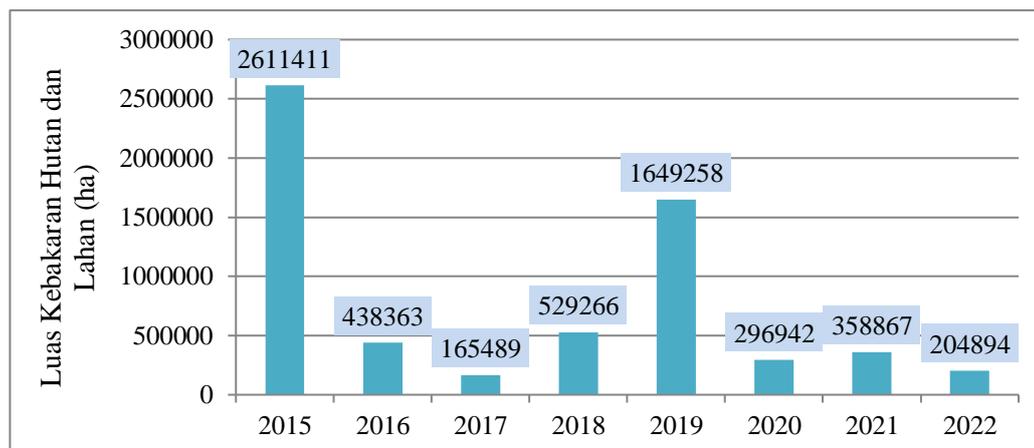
1.1 Latar Belakang dan Masalah

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dialami berbagai wilayah di dunia dan terjadi hampir setiap tahun. Kebakaran hutan merupakan sebuah peristiwa kebakaran liar yang tidak terkendali dan terjadi pada sebuah vegetasi atau kumpulan tumbuhan yang hidup dalam suatu ekosistem. Karhutla terjadi karena adanya faktor alami seperti interaksi biologis, meteorologis, fisik, hingga faktor sosial seperti tindakan pembakaran yang disengaja maupun tidak disengaja oleh manusia. Faktor-faktor tersebut menjadi penentu intensitas, skala, durasi hingga seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh insiden karhutla, yang mana berpotensi untuk memberikan dampak negatif di berbagai bidang termasuk ekonomi, lingkungan, dan keberlangsungan hidup masyarakat (UNEP, 2022).

Isu karhutla global semakin meningkat setiap tahunnya, diperkirakan hingga tahun 2016 lebih dari 420 juta ha luas hutan dan lahan di seluruh dunia terus terbakar setiap tahunnya (Giglio dkk., 2018). Peristiwa karhutla dipicu dan saling berkaitan dengan perubahan iklim. Perubahan iklim dan suhu yang panas membuat lahan menjadi kering dan lebih rentan terbakar karena frekuensi kondisi cuaca menjadi ekstrim sehingga memicu peningkatan kebakaran hutan dan hilangnya lahan (Bowman dkk., 2014). Deforestasi dan degradasi lahan meningkatkan emisi gas rumah kaca ke atmosfer sehingga mempengaruhi iklim dalam skala global. Selain itu, asap yang ditimbulkan dari karhutla mengandung polutan yang dapat merusak ekosistem hingga kesehatan manusia. Diperkirakan 339.000 jiwa meninggal setiap tahunnya karena permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh asap karhutla (Johnston dkk., 2012).

Karhutla dapat memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan biodiversitas khususnya menyebabkan hilangnya habitat asli beragam satwa dan tanaman endemik di berbagai wilayah dunia (Robinne, 2021). Hutan dan lahan juga menjadi penyedia berbagai sumber daya yang penting untuk manusia mulai dari kebutuhan dasar seperti pangan hingga produk hutan seperti pasokan kayu yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Menurut laporan United Nations Environment Programme (UNEP) dan GRID-Arendal resiko terjadinya karhutla akan meningkat sebanyak 14% pada tahun 2030, 30% menjelang tahun 2050 dan 50% menuju akhir abad (UNEP, 2022). Dengan demikian, upaya penanganan isu karhutla dari berbagai tingkatan diperlukan untuk menghadapi resiko dan ancaman yang akan semakin parah di masa mendatang.

Indonesia merupakan negara yang berada di peringkat kedelapan teratas sebagai wilayah dengan tutupan hutan terbesar di dunia (FAO, 2020) dengan luas hutan Indonesia pada tahun 2019 mencapai 94,1 juta ha atau sekitar 50,1% dari keseluruhan total daratan (Menlhk, 2020). Indonesia memiliki peranan yang signifikan dalam keberlangsungan lingkungan terutama untuk menekan angka pemanasan global. Indonesia dikenal pula sebagai paru-paru dunia dan menjadi negara yang menghasilkan oksigen terbanyak di urutan ke-2 di dunia (Menlhk, 2016). Peningkatan industrialisasi mendorong banyaknya pembukaan lahan dan pengalihfungsian kawasan hutan untuk pembangunan pabrik sehingga menyebabkan deforestasi dan degradasi kawasan hutan dan lahan di Indonesia (UNEP, 2022). Selain itu, musim kemarau yang panjang dan kekeringan membuat Indonesia harus menghadapi permasalahan karhutla yang cukup parah setiap tahunnya.



Gambar 1 Luas Area Karhutla Indonesia 2015-2022 (KLHK, 2023)

Pada tahun 2015, terjadinya peristiwa El Nino atau kenaikan suhu permukaan laut, menyebabkan Indonesia mengalami peristiwa karhutla yang mengakibatkan hilangnya 2.611.411 ha luas area hutan dan lahan Indonesia (Aminah dkk., 2020). Peristiwa ini juga mengakibatkan pelepasan karbon dioksida (CO₂) sebanyak 11,3 juta ton per harinya yang mana dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia (CIFOR, 2017). Meskipun berhasil menekan angka kebakaran hutan di tahun-tahun berikutnya, Indonesia kembali mengalami insiden karhutla yang parah di tahun 2019 sehingga Indonesia kehilangan 1.649.258 ha kawasan hutan dan lahannya (KLHK, 2020). Insiden karhutla masif yang menimpa Indonesia telah memberikan dampak negatif yang signifikan bukan hanya dalam lingkup domestik namun, telah menjadi isu internasional. Kebakaran hutan di Indonesia dapat mengarah pada krisis global seperti perubahan iklim yang parah, berkurangnya keragaman hayati, deforestasi dan degradasi lahan hingga berbagai dampak ekonomi seperti ketimpangan dan kemiskinan (Menlhk, 2021).

Dampak negatif yang disebabkan oleh kebakaran hutan yang parah pada tahun 2015 dan 2019 di Indonesia menyebar ke berbagai sektor. Hilangnya area hutan yang mencakup sebagian besar tanaman industri dan produk hutan menyebabkan Indonesia mengalami kerugian ekonomi hingga Rp 220 triliun pada tahun 2015 dan Rp 75 triliun pada tahun 2019 (BNPB, 2019). Karhutla di Indonesia juga menimbulkan masalah kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) pada sekitar 504.000 orang terutama anak-anak. Bukan

hanya itu, karhutla tersebut juga mengakibatkan hilangnya habitat keragaman hayati (Setkab, 2017a). Padahal, kawasan hutan dan lahan di Indonesia memiliki peranan penting yaitu, sebagai penyerap serta penampung cadangan karbon yang penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dunia (Ditjenppi, 2014). Area hutan dan lahan Indonesia mampu menyimpan 35 miliar ton karbon di dalam tanah yang apabila dialihfungsikan atau dibakar akan melepaskan 63% karbon yang berbahaya bagi lingkungan bukan hanya karbon dioksida namun juga, gas metana (CH₄) yang berbahaya 28-34 kali lipat dibandingkan karbon dioksida. Indonesia juga merupakan wilayah dengan biodiversitas yang tinggi dan menjadi tempat tinggal bagi hingga 15% spesies flora dan fauna di seluruh dunia (Greenpeace, 2022). Sehingga peristiwa karhutla akan menghilangkan habitat asli satwa dan tanaman endemik tersebut. Selain itu, konsekuensi dari kebakaran hutan juga mengakibatkan polusi asap berbahaya yang melewati batas-batas wilayah dan menyebar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sehingga merugikan negara-negara tersebut (Ariyani & Parameswari, 2020). Upaya penanggulangan yang efektif dan kolektif terkait permasalahan karhutla di Indonesia dibutuhkan untuk meminimalisir dampak negatif yang dapat mengancam keberlangsungan bumi dan kehidupan masyarakat.

Isu karhutla di Indonesia telah menyita perhatian internasional terutama karena dampaknya yang signifikan terhadap lingkungan dan iklim global. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan lingkungan termasuk perubahan iklim salah satunya dengan membentuk konvensi terkait perubahan iklim atau dikenal juga dengan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 1 Agustus 1994 (UNFCCC, 1994), Indonesia rutin menghadiri konferensi UNFCCC atau *Conference of Contracting Parties* (COP) sebagai pemenuhan agenda konvensi untuk membahas tentang upaya penanganan isu perubahan iklim dan permasalahan lingkungan global. Pelaksanaan COP UNFCCC melibatkan partisipasi dari berbagai aktor termasuk negara-negara anggota PBB yang telah meratifikasi UNFCCC, IGO dan NGO, dan para pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian dan andil dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Pada

COP-25 UNFCCC yang dilaksanakan di Madrid, Spanyol pada 2 hingga 13 Desember 2019 (UNFCCC, 2019), Indonesia membawa berbagai permasalahan lingkungan yang memerlukan perhatian masyarakat global termasuk terkait isu karhutla. Melalui pertemuan itu, International Tropical Timber Organization (ITTO) menginisiasi pembentukan proyek kerja sama dengan Indonesia terkait penanggulangan isu karhutla di Indonesia.

ITTO merupakan sebuah organisasi internasional antarpemerintah yang didirikan di bawah naungan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang merupakan tindak lanjut dari pembentukan International Tropical Timber Agreement (ITTA) pada tahun 1983. ITTO merupakan sebuah organisasi yang dibangun dengan tujuan untuk menciptakan sistem industri dan perekonomian yang efektif dalam transaksi perdagangan kayu tropis antara negara produsen dan negara konsumen secara global dengan tetap mempertimbangkan perspektif lingkungan (UNCTAD, 2004). Keanggotaan ITTO mewakili hingga 90% perdagangan kayu tropis global dan lebih dari 80% hutan tropis dunia termasuk Indonesia yang telah resmi menjadi anggota sebagai negara produsen atau pemasok kayu tropis global sejak tahun 1986 (ITTO, 2022). Organisasi ini berpusat di Jepang sebagai anggota negara konsumen dan negara pusat operasi dan administrasi ITTO atau negara tuan rumah (*headquarters*). Mandat kelembagaan ITTO mulanya hanya terpaku pada aktivitas ekspor dan impor kayu global saja namun, seiring perkembangannya organisasi ini mulai melakukan renegotiasi dalam perjanjian yang melandasinya yaitu ITTA 1983 dan memperbaruinya dengan mempertimbangkan isu terkait pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan konservasi.

Negara-negara yang tergabung menjadi anggota ITTO sepakat untuk mengamandemen perjanjian ITTA 1983. Setelah melalui beberapa tahapan negosiasi poin-poin ITTA 1983 pun berubah dan menjadi ITTA 1994. Perjanjian baru ini memuat tujuan terkait pengelolaan hutan berkelanjutan yang lebih eksplisit dengan menambahkan poin-poin terkait reforestasi, rehabilitasi lahan hutan yang terdegradasi, dan konservasi (ITTA, 1994). Pada tahun 2006, ITTA 1994 kemudian kembali disempurnakan dan digantikan oleh ITTA 2006. ITTA 2006 merujuk pada perjanjian sebelumnya yaitu ITTA 1983 dan ITTA 1994

dengan mencantumkan tujuan utama yang berfokus pada 6 area yaitu (ITTA, 2006):

1. *Sustainable forest management*

ITTO sebagai organisasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hutan tropis dengan memberikan bantuan kepada negara anggota melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan, mengurangi penebangan liar, manajemen kebakaran, konservasi biodiversitas, menerapkan restorasi hutan dan pengendalian lingkungan.

2. *Economics, statistics and markets*

ITTO berupaya meningkatkan intelijen pasar dan meningkatkan transparansi pasar kayu internasional melalui publikasi tren pasar, harga dan berita perdagangan dari seluruh dunia, menyusun statistik produksi perdagangan kayu global, bekerja sama dengan anggota dalam penegakan hukum, dan menjamin perdagangan kayu tropis yang diproduksi secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

3. *Sustainable forest industries*

ITTO membantu negara dan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam industri dan pemasaran produk hutan, mengadopsi sertifikasi hutan dan rantai pasok yang ramah lingkungan, membangun dan mengelola hutan produksi.

4. *Climate change mitigation and adaptation*

ITTO bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati di hutan produktif dan kawasan lindung, meminimalisir resiko karhutla, mengelola hutan secara berkelanjutan untuk meningkatkan penyerapan karbon dan mengurangi deforestasi dan degradasi lahan, mengembangkan kebijakan dan praktik yang sesuai untuk reduksi emisi karbon.

5. *Capacity building*

Tujuan mendasar ITTO adalah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan lestari di daerah tropis dengan melibatkan negara dan pemerintah lokal untuk menggunakan sumber daya secara berkelanjutan. ITTO menggelar proyek kerja sama dengan anggota dan menerapkan SFM melalui pelatihan di tingkat lokal, nasional dan regional untuk meningkatkan

keterampilan dalam mengatasi permasalahan hutan termasuk deforestasi, degradasi dan karhutla.

6. *Contributions to sustainable development goals*

ITTO sebagai organisasi internasional turut berkontribusi untuk mempromosikan tujuan berkelanjutan melalui perdagangan kayu tropis dari sumber yang legal dan berkelanjutan. Tujuan ini berhubungan erat dengan poin-poin SDG yaitu poin 1 tanpa kemiskinan, poin 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, poin 13 penanganan perubahan iklim dan poin 15 ekosistem daratan.

Organisasi ini telah berorientasi pada proyek kerja sama dan aksi langsung dengan mendanai dan membantu mengembangkan kapasitas negara dalam manajemen hutan tropis dan telah melakukan lebih dari 1200 proyek dan kegiatan terkait *sustainable forest management* (SFM) dalam berbagai aspek terutama untuk anggota negara produsen termasuk Indonesia (ITTO, 2020). ITTO dan Indonesia dengan berpedoman pada ITTA 2006 telah melakukan serangkaian proyek kerja sama untuk mendukung hutan dan kayu tropis Indonesia mulai dari kerja sama terkait budidaya, pengelolaan produk tropis hingga manajemen hutan termasuk penanganan masalah hutan seperti karhutla. ITTO sebagai organisasi yang berfokus pada peredaran kayu di pasar global memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa kayu dan produk hutan yang dihasilkan khususnya dari negara anggota produsen di wilayah tropis terkelola secara baik atau menerapkan *sustainable forest management* termasuk terkait resiko kerusakan hutan dan karhutla (GFMC, 2002). ITTO menyadari bahwa kebakaran merupakan permasalahan serius yang mengancam hutan terutama di negara tropis karena itu, komitmen utama ITTO sebagai organisasi adalah berperan dalam manajemen kebakaran hutan dan pencegahan karhutla melalui implementasi kebijakan dan panduan terhadap manajemen hutan atau mengeluarkan *ITTO Guidelines on Fire Management in Tropical Forests* untuk negara-negara tropis serta mendanai pelaksanaan proyek kerja sama yang mampu meningkatkan kemampuan negara dalam mengelola hutannya dan mencegah terjadinya bencana yang dapat membahayakan hutan seperti karhutla (Carillo dkk., 2015).

Pada agenda COP-25 UNFCCC tepatnya pada tanggal 13 Desember 2019, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan pihak ITTO merancang kesepakatan kerja sama terkait penanganan karhutla di Indonesia dengan mengusung tema “*Capacity Building on Forest and Land Fire Management in Indonesia*”. Rencana kerja sama ini dibentuk dalam sebuah proposal resmi yang diajukan oleh Indonesia kepada ITTO untuk ditinjau dan disetujui. Proses peninjauan dokumen kerja sama bertujuan untuk mengatur kegiatan, target, tujuan serta sumber dana untuk implementasi proyek. Kerja sama ini disponsori oleh donor dana dari pemerintah Jepang yang merupakan negara *headquarters* dan anggota negara konsumen organisasi ITTO (ITTO, 2020). Dokumen kerja sama yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Indonesia, Jepang dan ITTO bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya karhutla di Indonesia serta penanganan dampak dari kebakaran tersebut dengan berfokus pada penanggulangan di 3 wilayah Indonesia yang memiliki cakupan hutan terluas dan paling sering mengalami permasalahan karhutla yaitu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan (Ditjenppi, 2020).

Poin kerja sama yang dilakukan menitikberatkan pada *sustainable forest management* (SFM) atau pengelolaan hutan secara berkelanjutan yaitu mencakup pelaksanaan praktik agrikultur dengan teknik pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengelolaan pertanian dan kehutanan dengan melibatkan komunitas masyarakat peduli api yang diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan pencegahan karhutla selanjutnya, peningkatan kapasitas manajemen untuk mengatasi permasalahan karhutla dengan penguatan pasukan pemadam api atau dikenal juga dengan nama Manggala Agni dan penyediaan peralatan keselamatan dan infrastruktur kebakaran untuk pasukan pemadam api (Satkuru, 2021), hingga peningkatan tindakan pencegahan karhutla, dengan mengembangkan sistem pelaporan patroli pencegahan di daerah rawan kebakaran serta meningkatkan kolaborasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan termasuk lembaga lokal, sektor swasta, masyarakat, hingga perwakilan di tingkat regional dalam pencegahan dan mitigasi isu karhutla (ITTO, 2020). Upaya pencegahan yang dilakukan oleh ITTO dan Indonesia ini membawa dampak yang cukup positif

dimana terjadi pengurangan yang signifikan terhadap luas area hutan dan lahan yang terbakar semenjak periode kerja sama dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa ITTO menjalankan fungsinya dengan cukup baik dalam upaya membantu Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dalam pencegahan isu karhutla.

1.2 Rumusan Masalah

Isu karhutla telah menjadi permasalahan global yang mengkhawatirkan karena peningkatan kasusnya yang semakin tinggi setiap tahunnya. Permasalahan karhutla memiliki dampak negatif pada berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan termasuk perubahan iklim, Indonesia sebagai negara dengan luas hutan dan lahan yang besar kerap kali mengalami isu karhutla yang parah dan terus meningkat setiap tahunnya. Peristiwa karhutla yang parah di Indonesia pada tahun 2015 dan 2019 telah menarik perhatian publik internasional karena memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas lingkungan global. Isu karhutla masif yang terjadi pada Indonesia terakhir kali sama pada konferensi COP-25 UNFCCC tahun 2019 yang membahas tentang penanggulangan permasalahan iklim dan lingkungan, dalam ajang tersebut Indonesia mendapat tawaran kerja sama dari ITTO untuk meningkatkan kapasitas dalam mencegah karhutla. ITTO merupakan sebuah organisasi antarpemerintah internasional yang memiliki fokus terhadap perwujudan perdagangan kayu tropis global yang efektif melalui implementasi pengelolaan hutan yang berkelanjutan. ITTO sebagai organisasi internasional memiliki fungsi untuk mewujudkan kerja sama yang bertujuan agar dapat meningkatkan kapasitas Indonesia dalam upaya pencegahan kebakaran hutan terutama di wilayah Indonesia yang rawan mengalami karhutla dari tahun 2019 hingga 2022. Sehingga dari rumusan masalah di atas, penulis mengambil sebuah pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana upaya International Tropical Timber Organization dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2019-2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat menjawab pertanyaan penelitian yang muncul dari adanya rumusan masalah. Sehingga, penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu:

1. Mendeskripsikan kondisi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia
2. Mendeskripsikan upaya ITTO dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam pengembangan di bidang akademis terkait konsep-konsep dan teori dalam keilmuan hubungan internasional yang secara spesifik berkenaan kajian organisasi internasional dan fungsi lembaga dalam mengatasi isu internasional yang dalam hal ini terkait kebakaran hutan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dalam Hubungan Internasional dengan menyediakan data informasi serta menambah wawasan pembaca terkait upaya sebuah organisasi antarpemerintah yaitu ITTO dalam membantu Indonesia mencegah permasalahan karhutla di negaranya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi data termasuk dalam penerapan teori dan konsep sebagai landasan pembangunan kerangka berpikir. Penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Fachrie tahun 2020 yang berfokus untuk mengkaji tentang dampak permasalahan kebakaran hutan dan polusi asap di Indonesia terhadap keamanan manusia dan juga lingkungan bukan hanya di wilayah Indonesia namun, menyebar ke negara-negara lain (Fachrie, 2020). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui sumber referensi dan penelitian terdahulu. Selain itu, konsep *human security* juga diterapkan untuk menganalisis topik penelitiannya.

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa isu kebakaran hutan dan polusi asap di Indonesia telah memberikan pengaruh negatif bukan hanya dalam lingkup domestik namun juga secara global khususnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Fachrie memaparkan bahwa permasalahan kebakaran hutan dan polusi asap telah mengancam keamanan manusia dalam tujuh dimensi termasuk ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, budaya, individu dan politik (Fachrie, 2020), Pemerintah Indonesia perlu menjamin keamanan masyarakat dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga dengan melakukan konsolidasi mendalam terhadap pemahaman tentang keamanan manusia serta mengelaborasi masyarakat akan resiko bahaya yang dapat ditimbulkan oleh masalah kebakaran hutan dan polusi asap. Pemerintah Indonesia juga dapat menjalin kerja sama dan meningkatkan elaborasi terkait keamanan manusia dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia agar dapat menanggulangi isu kebakaran hutan dan polusi asap ini (Fachrie,2020)

Penelitian kedua yang dilakukan pada tahun 2014 oleh Linas Didvalis membahas tentang peran Jepang sebagai salah satu anggota penting dalam organisasi ITTO dalam kerja sama terkait perlindungan hutan di Asia Tenggara (Didvalis, 2014). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta teori kerja sama internasional dan konsep kepentingan nasional untuk menjelaskan keterlibatan Jepang dalam promosi SFM di kawasan Asia Tenggara terutama melalui kerja sama bilateral bersama Indonesia dan Malaysia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama dua dekade terakhir fokus kegiatan ITTO yang semula terpaku pada ekonomi dan perdagangan terkait produk hutan terutama kayu tropis telah beralih menjadi isu perlindungan hutan dan pencegahan praktik penebangan ilegal di negara-negara Asia Tenggara yang sebagian besar memegang peranan penting sebagai pemasok kayu tropis global (Didvalis, 2014). Jepang sebagai anggota ITTO secara aktif memperlihatkan keikutsertaannya dalam permasalahan terkait hutan dan lahan dengan menandatangani perjanjian bilateral dengan Indonesia dan Malaysia. Namun, kesepakatan tersebut berdampak pada berubahnya sistem perdagangan kayu tropis global dan merugikan perusahaan-perusahaan kayu domestik di Jepang. Sehingga proses kerja sama bilateral yang telah disepakati tidak berjalan begitu lancar karena peranan Jepang dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya untuk mempertahankan keuntungan dari sistem perdagangan yang telah ada sebelumnya (Didvalis, 2014).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Tri Sulistyati Widyaningsih dan San Afri Awang yang mengkaji tentang pelaksanaan proyek lingkungan yang dilakukan oleh ITTO di Indonesia pada tahun 2011 (Widyaningsih & Awang, 2011). Pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, hingga studi dokumentasi serta teori *community empowerment* diterapkan dalam penelitian ini. Fokus penelitian adalah untuk menganalisis proses pemberdayaan masyarakat kabupaten Ciamis mengenai pengelolaan hutan lestari berdasarkan proyek model desa ITTO.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan ITTO terkait pemberdayaan masyarakat tentang manajemen serta rehabilitasi hutan dan lahan memerlukan koordinasi yang lebih terstruktur

dan efektif, karena sistem *top down* yang dilakukan tidak dapat diberlakukan untuk tiap kelompok tani atau masyarakat pengelola hutan dan lahan di Indonesia (Widyaningsih & Awang, 2011). Masing-masing kelompok masyarakat yang mendapat tugas untuk mengelola hutan memiliki kriteria yang berbeda sehingga diperlukan metode penanganan yang khusus untuk setiap area hutan dan lahan yang hendak ditangani. Keberadaan fasilitator hingga perencanaan yang lebih matang dan tidak seragam dapat menghasilkan kinerja yang lebih efektif dari masyarakat dan pengelolaan hutan dan lahan yang lebih optimal (Widyaningsih & Awang, 2011).

Penelitian keempat berupaya untuk mengkaji tentang kerja sama Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara terkait polusi asap lintas batas akibat karhutla. Penelitian yang dilakukan oleh Fadila Ariyani dan Puti Parameswari pada tahun 2020 ini berfokus pada pengimplementasian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) oleh pemerintah Indonesia dalam isu karhutla yang mengakibatkan polusi asap lintas batas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengaplikasikan teori kerja sama internasional dan konsep regionalisme (Ariyani & Parameswari, 2020).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ASEAN memiliki peranan penting sebagai organisasi regional untuk mendukung permasalahan kebakaran hutan di Indonesia yang mengakibatkan polusi asap lintas batas yang menyebar luas ke negara-negara tetangga sehingga mencemari lingkungan (Ariyani & Parameswari, 2020). Semenjak Indonesia meratifikasi AATHP pada tahun 2014, Indonesia telah meningkatkan beberapa upaya penanggulangan isu kebakaran hutan seperti pemadaman kebakaran dengan cara yang lebih efektif, menguatkan peran lembaga dan badan terkait penanggulangan kebakaran hutan hingga penerapan sanksi pada pelaku pembakaran hutan. Kinerja negara anggota kesepakatan polusi asap lintas batas di ASEAN ditinjau melalui COP, dimana negara anggota dapat meminta asistensi negara lain dalam upaya penanganan isu kebakaran hutan. Hingga tahun 2019 angka luas kebakaran hutan di Indonesia terus menurun dibandingkan dengan tahun 2015 (Ariyani & Parameswari, 2020). Penanganan yang cepat dan efektif dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia dan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari asap.

Penelitian kelima dilakukan oleh Ahmad Muzaki dan beberapa rekannya pada tahun 2021 untuk membahas tentang isu pengendalian kebakaran hutan di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berfokus pada analisis terhadap studi kasus melalui penerapan konsep *sustainable development goals* atau pengembangan berkelanjutan (Muzaki dkk., 2021). Penelitian Muzaki, dkk. menyajikan analisis dampak negatif akibat karhutla yang terjadi di Indonesia serta upaya yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hasil penelitian Muzaki dan rekannya menunjukkan bahwa isu kebakaran hutan memberikan dampak negatif kepada Indonesia baik dari sisi kesehatan, ekonomi, dan keberlangsungan lingkungan. Penyebab utama permasalahan ini adalah karena tingginya tingkat pembukaan lahan yang dilakukan oleh pengusaha di berbagai wilayah Indonesia. Pengendalian serta pengawasan optimal terhadap maraknya peristiwa pembukaan lahan dan kebakaran hutan di Indonesia harus ditindaklanjuti dengan penguatan tugas pokok dan fungsi polisi hutan. Pihak polisi hutan dapat bekerja sama dengan Dinas Tata Ruang untuk membentuk peta rencana tata ruang untuk membatasi wilayah mana saja yang dapat diberikan akses untuk pembakaran dan pembukaan lahan (Muzaki dkk., 2021). Selain itu, polisi hutan juga dapat mengarahkan para pemangku kepentingan untuk menerapkan mekanisme manual dalam pembukaan lahan yang tidak melibatkan proses pembakaran hutan agar dapat meminimalisir pengaruh negatif dari adanya karhutla (Muzaki dkk., 2021). Pengendalian isu karhutla memerlukan andil dari berbagai pihak untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan ke-15 yaitu, menjaga ekosistem darat demi keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia.

Penelitian terakhir, dilakukan oleh Muhammad Mirza Rizki Yudha dan Viani Puspita Sari pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan teori neoliberal institusionalisme dan konsep bantuan luar negeri untuk mendeskripsikan hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia dalam kerja sama pembangunan transportasi publik *Mass Rapid Transit* (MRT) di Jakarta, Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan tujuan serta kepentingan masing-masing aktor dalam proyek kerja sama ini (Yudha & Sari, 2023).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sesuai dengan paradigma neoliberal institusionalisme kerja sama antara Jepang dan Indonesia melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam proyek MRT ini didasari karena adanya keuntungan bagi kedua belah pihak atau *mutual benefits*. Jepang memiliki kepentingan untuk mengekspansi citra baik dan ekonomi negaranya melalui revitalisasi negara-negara berkembang dan pendirian perusahaan-perusahaan Jepang di luar negeri dengan memberikan bantuan luar negeri berupa *Official Development Assistance* (ODA) termasuk kepada Indonesia. Sementara, bagi Indonesia keuntungan yang didapat adalah memajukan kesejahteraan masyarakat domestik melalui pembangunan fasilitas transportasi publik guna menyelesaikan permasalahan transportasi dan kemacetan yang dialami serta meningkatkan potensi lapangan kerja dan perekonomian nasional (Yudha & Sari, 2023). Meskipun demikian, dalam prosesnya kerja sama ini mengalami hambatan berupa pelaksanaan waktu kerja sama yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga membuat penyelesaian proyek kerja sama tertunda.

Berdasarkan jurnal dan data analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini akan menjelaskan tentang upaya ITTO sebagai organisasi dalam mencegah isu karhutla di Indonesia melalui proyek kerja sama yang diusulkan pada tahun 2019 hingga 2022. Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif akan digunakan untuk menganalisis topik penelitian. Artikel jurnal dan penelitian terdahulu yang membahas tentang proyek kerja sama ITTO dalam mencegah permasalahan lingkungan khususnya karhutla akan menjadi acuan utama yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini akan mengaplikasikan teori neoliberal institusionalisme dengan menjadikan penelitian terdahulu yang membahas pendekatan tersebut sebagai referensi untuk menjelaskan fungsi ITTO dalam membantu Indonesia mencegah masalah lingkungan karhutla melalui kerja sama proyek pembangunan kapasitas dalam penanggulangan kasus kebakaran hutan.

2.2 Landasan Konsep/Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian sosial berguna untuk memberikan alasan untuk menganalisis topik penelitian dan menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk memahami suatu fenomena sosial (Bryman, 2012). Penelitian ini menggunakan teori neoliberal institusionalisme untuk mendeskripsikan upaya ITTO dengan menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional dalam membantu negara anggotanya yakni Indonesia mencegah isu karhutla melalui kerja sama proyek pembangunan kapasitas manajemen penanggulangan karhutla.

2.2.1 Neoliberal Institusionalisme

Neoliberal institusionalisme merupakan teori yang telah menjadi studi para akademisi pada tahun 1940-an hingga 1950-an. Teori ini berkembang dari pemikiran teori liberalisme klasik dengan menekankan pada poin pencapaian perdamaian dan kesejahteraan dapat dilakukan apabila negara saling berbagi sumber daya atau bahkan merelakan sebagian kedaulatan mereka dalam sebuah komunitas yang terintegrasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga mengatasi isu regional (Lamy, 2014). Asumsi teori ini semakin berkembang pada tahun 1970-an dimana para pakar seperti Robert Keohane dan Joseph Nye memperkenalkan konsep saling ketergantungan yang kompleks. Keduanya mengungkapkan bahwa adanya globalisasi mendorong perkembangan dunia yang pesat sehingga membuat interaksi antar aktor internasional semakin beragam dan saling mengandalkan satu sama lain untuk mencapai keuntungan masing-masing. Hal ini ditandai dengan meningkatnya hubungan antara aktor negara dan non-negara, munculnya agenda isu internasional yang baru yang tidak berfokus pada isu *high politics* namun juga *low politics*, semakin banyaknya interaksi antar aktor yang melintasi batas dan penolakan bahwa kekuatan militer merupakan satu-satunya cara untuk mempertahankan otoritas negara (Keohane & Nye, 2012).

Neoliberal institusionalis beranggapan bahwa meskipun sistem dunia yang bersifat anarki membatasi keinginan negara untuk melakukan kerja sama, negara tetap dapat melaksanakan kerja sama dengan bantuan dari institusi internasional (Grieco, 1993). Hal tersebut yang mendasari pemikiran neoliberalis bahwa negara

merupakan aktor rasional yang memiliki kecenderungan untuk bekerja sama agar dapat memaksimalkan keuntungan absolut dimana negara akan bekerja sama dengan negara lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dan memperoleh keuntungan secara keseluruhan tanpa membandingkan keuntungan yang didapat dengan pihak yang diajak bekerja sama (Grieco, 1993). Sebagai hasilnya, kerja sama akan semakin sering dilakukan oleh aktor negara melalui institusi karena hal tersebut memungkinkan negara untuk menyelesaikan sebuah isu yang menjadi kekhawatirannya dan berpotensi berpengaruh secara global melalui aksi yang lebih kolektif dan terorganisir.

Menurut teori neoliberal institusionalisme, negara-negara akan terus saling berinteraksi melalui kerja sama dan akan menyadari bahwa interaksi serupa dengan aktor yang sama akan semakin banyak muncul di masa depan. Hal tersebut memotivasi negara untuk membentuk sebuah institusi internasional yang dapat menjadi aktor yang mengatur perilaku negara, menyediakan wadah untuk tawar-menawar dan menciptakan mekanisme yang dapat meminimalisir kecurangan dengan memantau transparansi dan memberikan fasilitas kerja sama kepada seluruh anggota institusi. Hal ini dapat menguntungkan negara yang tergabung dalam institusi terutama dalam mengatasi permasalahan yang sulit untuk dilakukan secara unilateral (Karns dkk., 2015). Pandangan ini juga mengatakan bahwa proses kerja sama selalu menghadapi hambatan. Tantangan terbesar yang berpotensi muncul dalam proses kerja sama adalah adanya aksi *noncompliance* atau pelanggaran perjanjian atau aturan yang telah disepakati oleh negara yang berpartisipasi dalam proses kerja sama (Lamy, 2014). Meskipun demikian, negara akan berupaya untuk mengalihkan loyalitas serta sumber daya yang dimiliki kepada institusi jika mereka menganggap bahwa terdapat tujuan atau keuntungan bersama yang bisa dicapai dalam kerja sama.

Peranan institusi internasional seperti organisasi-organisasi internasional yang terdapat perwakilan negara di dalamnya, kesepakatan-kesepakatan yang terjalin antara negara-negara, dan konvensi-konvensi yang memfasilitasi interaksi antar negara menjadi sebuah wadah yang penting bagi terciptanya kerja sama antar negara untuk memenuhi tujuannya. Menurut Karns, Mingst dan Stiles dalam bukunya yang berjudul *International Organizations: The Politics and Processes*

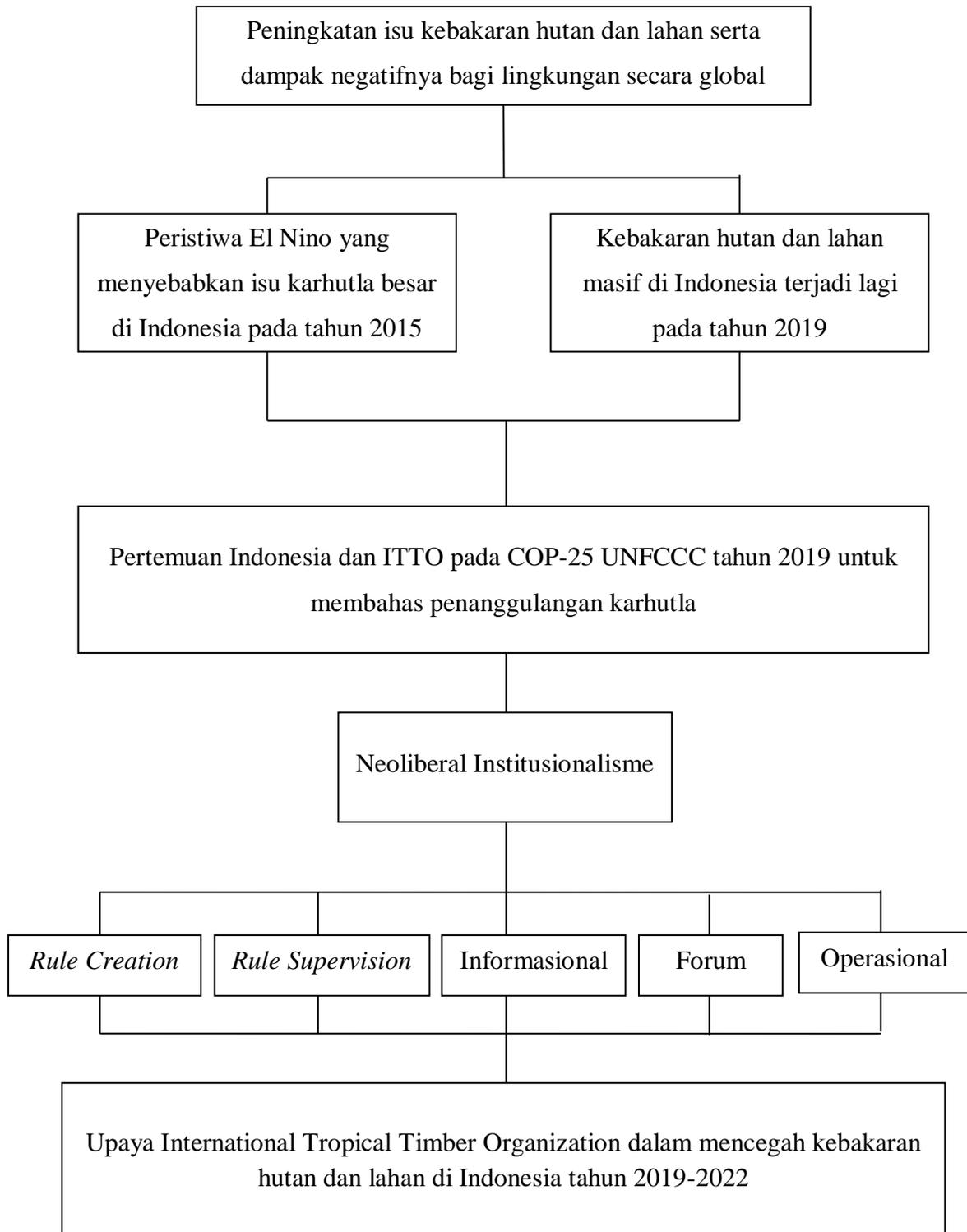
of Global Governance, organisasi internasional memiliki fungsi-fungsi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap negara anggota saling berinteraksi dan dan proses kerja sama berjalan lancar. Adapun beberapa fungsi yang dimiliki oleh organisasi internasional, sebagai berikut (Karns dkk., 2015):

1. Fungsi *Rule Creation*, organisasi memiliki fungsi untuk menyusun kesepakatan dan perjanjian yang mengikat secara hukum
2. Fungsi *Rule Supervision*, organisasi bertindak sebagai pengawas yang memantau kepatuhan terhadap kesepakatan, mengadili perselisihan yang muncul, serta mengambil tindakan yang diperlukan termasuk penegakan hukum
3. Fungsi Informasional, dimana organisasi berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyebarkan data informasi kepada negara anggota organisasi secara adil dan merata demi keberlangsungan kerja sama
4. Fungsi Forum, yaitu organisasi berperan sebagai wadah bagi para aktor untuk saling berdiskusi, bertukar pendapat dan membuat keputusan secara kolektif terkait isu tertentu.
5. Fungsi Operasional, dimana organisasi berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya, memberikan bantuan teknis dan mengerahkan atau mengirimkan pasukan.

Permasalahan karhutla yang dialami oleh Indonesia terutama yang terjadi pada tahun 2015 dan 2019 telah berkembang menjadi isu lintas batas yang menarik perhatian internasional karena dampaknya yang signifikan terhadap lingkungan global. Untuk mengatasi masalah tersebut ITTO sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk mempromosikan SFM menginisiasi proyek kerja sama untuk membantu Indonesia agar dapat menanggulangi isu karhutla. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis upaya ITTO sebagai organisasi internasional dalam menjalankan fungsinya dan memberikan asistensi kepada negara anggotanya yaitu Indonesia untuk mencegah isu karhutla melalui kerja sama proyek pembangunan kapasitas manajemen penanggulangan karhutla sesuai dengan indikator yang terdapat dalam teori neoliberal institusionalisme.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya peningkatan kasus kebakaran hutan di dunia yang mempengaruhi stabilitas lingkungan. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami isu karhutla yang parah yaitu pada tahun 2015 serta 2019 sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan domestik dan global. Untuk itu, pada konferensi lingkungan dan perubahan iklim tahun 2019 atau COP-25 UNFCCC, Indonesia menyepakati kerja sama dengan ITTO pada tahun yang sama dalam peningkatan kapasitas manajemen dalam mengatasi permasalahan karhutla, dan peningkatan upaya pencegahan karhutla. Pengaplikasian teori neoliberal institusionalisme dan fungsi organisasi internasional digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan serta menganalisis kegiatan dan upaya pencegahan apa saja yang dilakukan oleh aktor yaitu ITTO dan Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan karhutla.



Gambar 2 Bagan Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dibentuk oleh individu atau kelompok dalam suatu isu atau fenomena sosial tertentu. Proses penelitian kualitatif berfokus pada upaya menjawab pertanyaan penelitian yang muncul karena sebuah isu atau topik yang diteliti kemudian peneliti menganalisis data secara induktif dari tema khusus ke tema umum kemudian melakukan interpretasi atas hasil analisis tersebut (Creswell, 2014). Sementara itu, Alan Bryman menerangkan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah strategi penelitian yang lebih menekankan pada kata-kata dibandingkan kuantifikasi atau proses penghitungan dan kalkulasi dalam proses pengumpulan dan analisis data (Bryman, 2012). Penelitian ini akan menggunakan kata-kata dengan menyajikan analisis serta interpretasi terhadap temuan-temuan data yang telah dikumpulkan.

Selain itu, secara spesifik penelitian ini juga akan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Neuman, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan sebuah gambaran rinci terkait fenomena sosial yang sedang dikaji. Penelitian deskriptif memanfaatkan penggunaan kata hingga angka agar dapat menyajikan sebuah penjelasan secara menyeluruh, klasifikasi jenis, atau kerangka terstruktur dan langkah-langkah mengenai sebuah isu spesifik agar dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian terkait siapa, kapan, dimana, maupun bagaimana (Neuman, 2014). Adapun penelitian ini berupaya untuk memberikan penjelasan serta analisis terperinci

dalam menjawab pertanyaan penelitian terkait “Bagaimana Upaya International Tropical Timber Organization dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2019-2022” dengan mengaplikasikan jenis penelitian deskriptif.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan dalam penelitian yang akan menentukan aspek dan indikator spesifik apa yang akan dianalisis secara rinci dalam penelitian tersebut. Selain itu, fokus penelitian berguna untuk mempermudah pengumpulan dan pengelolaan informasi serta data untuk dianalisis. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis tentang upaya ITTO dalam membantu pemerintah Indonesia mencegah permasalahan karhutla melalui kerja sama yang didanai oleh Jepang dengan teori neoliberal institusionalisme. Penelitian ini juga akan berfokus untuk menganalisis upaya yang dimulai pada tahun 2019 hingga 2022 dan pelaksanaannya di 3 wilayah Indonesia yang memiliki cakupan hutan terluas dan paling sering mengalami isu karhutla yaitu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang berasal dari data sekunder. Data sekunder merupakan bentuk data yang telah tersedia dan ada sebelumnya bukan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel berita, laporan dan pernyataan resmi yang dimuat dalam berbagai media publik seperti laman internasional dan nasional pemerintah serta organisasi dan institusional terkait yang bergerak dalam bidang lingkungan. Sumber referensi utama dalam penelitian ini adalah artikel berita dan laporan yang tersedia di laman resmi ITTO terkait kerja sama Indonesia dan ITTO dalam isu karhutla, publikasi resmi di situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) khususnya Direktorat Manajemen Hutan dan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) dan serta berbagai artikel berita yang berasal dari portal media massa terkait penanganan isu karhutla di Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data dan membentuknya menjadi sampel kemudian diolah sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengumpulan data dilakukan agar peneliti dapat menentukan gambaran luas tentang topik yang hendak dianalisis sehingga dapat menentukan fokus penelitian serta merancang instrumen penelitian untuk mengimplementasikan apa yang hendak diketahui. Adapun dalam penelitian ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, studi pustaka dan studi dokumentasi.

1. Studi pustaka

Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan mengidentifikasi informasi yang relevan dalam proses penemuan dan pengumpulan data termasuk penelusuran sumber data yang dipublikasikan secara umum seperti buku dan jurnal demi memperoleh informasi (Bryman, 2012). Pengkajian terhadap penelitian terdahulu tentang isu karhutla di Indonesia serta penanganan permasalahan tersebut secara domestik dan melalui kerja sama dengan pihak lain dilakukan agar dapat membangun gambaran luas terkait topik penelitian yaitu, kerja sama Indonesia dan ITTO terkait isu karhutla. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah dari penelitian terdahulu, artikel berita dari laman resmi kementerian Indonesia (menlhk.go.id, dan kemlu.go.id), artikel dan laporan dari organisasi internasional terkait karhutla (ITTO, UNCTAD, BPS, Greenpeace dan RFRMRC-SEA)

2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data penelitian melalui dokumen yang tidak diproduksi secara spesifik untuk keperluan penelitian sosial namun, relevan dan tersedia untuk analisis ataupun penelitian (Bryman, 2012). Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu dokumen resmi ITTO yaitu ITTA 1983, ITTA 1994, ITTA 2006, ITTO Guidelines on Fire

Management in Tropical Forest, dokumen resmi negara yaitu Keppres No.4 Tahun 1995 tentang Pengesahan International Tropical Timber Agreement 1994 dan juga Perpres No. 78 Tahun 2008 tentang Pengesahan International Tropical Timber Agreement 2006, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta lampiran berupa foto yang diunduh dari situs dan akun resmi KLHK dan ITTO.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang menggabungkan beberapa elemen atau tahapan tertentu seperti pengumpulan dan penyortiran segala jenis data serta informasi yang ditemukan, pengelolaan data, analisis data hingga interpretasi data untuk mencapai hasil penelitian (Bryman, 2012). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kerja sama Indonesia dan ITTO terkait isu karhutla ini akan didasarkan pada model analisis data yang dipaparkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Proses analisis data pada penelitian kualitatif mencakup tiga tahapan penting yang perlu dilakukan, yakni (Miles dkk., 2014):

1. Kondensasi data

Kondensasi data atau pemadatan data mengacu pada proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi sejumlah data yang ada dalam catatan lapangan tertulis, wawancara, transkrip, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Proses pemadatan data dilakukan dengan memfokuskan, memperkuat, mengurutkan, atau mengatur data agar dapat mencapai kesimpulan yang valid. Dalam kondensasi data, peneliti memilah data tentang kerja sama Indonesia dan ITTO dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan karhutla, kemudian memparafrase atau meringkas hasil temuan dan informasi serta menggolongkan data-data ke dalam pola tertentu agar dapat mempermudah peneliti dalam tahapan penyajian data.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data yang bertujuan agar kumpulan informasi yang telah diolah dapat disajikan dengan tampilan yang lebih mudah diakses sehingga dapat dipahami untuk tahapan selanjutnya dalam proses analisis. Penelitian ini menyajikan data dalam bentuk teks yang menjelaskan proses pelaksanaan kerja sama Indonesia dan ITTO dalam menangani karhutla, dimana poin terkait aktor yang terlibat dalam kerja sama, hubungan kerja sama serta kegiatan dan agenda yang dilakukan dalam kerja sama disajikan melalui paragraf terstruktur yang terbagi menjadi beberapa bagian dan sub-topik. Data terkait rincian kerja sama seperti luas area terdampak karhutla di Indonesia, lokasi kerja sama, dan rincian kegiatan kerja sama disajikan, perbandingan luas area terbakar sebelum dan sesudah kerja sama dalam bentuk gambar dan tabel agar penyampaian informasi dapat lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan akhir dalam proses analisis yang bertujuan untuk membuat kesimpulan kemudian memverifikasi hasil olah data atau penelitian. Data terkait pelaksanaan kegiatan kerja sama Indonesia dan ITTO terkait isu karhutla yang telah dijelaskan dan disajikan dalam hasil penelitian kemudian akan diinterpretasikan dalam kesimpulan kemudian hasil temuan dan informasi tersebut menjadi acuan untuk penambahan saran dan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah Indonesia, ITTO serta penelitian selanjutnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kerja sama ITTO dan Indonesia dilatarbelakangi oleh permasalahan karhutla yang melanda Indonesia pada tahun 2015 dan 2019. Insiden ini telah menarik perhatian publik internasional karena permasalahan karhutla memiliki dampak negatif pada berbagai aspek seperti ekonomi dan kehidupan sosial dimana peristiwa karhutla Indonesia menimbulkan polusi asap lintas batas ke negara lain dan berpotensi pada perubahan iklim serta keberlangsungan lingkungan global. Untuk itu, pada konferensi COP-25 UNFCCC tahun 2019 yang membahas tentang penanggulangan permasalahan iklim dan lingkungan, Indonesia menyepakati tawaran kerja sama dari ITTO yang didanai oleh Pemerintah Jepang untuk mengatasi kebakaran hutan terutama di wilayah Indonesia yang rawan mengalami karhutla.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Indonesia untuk menerima tawaran kerja sama oleh ITTO didasari karena ketidakmampuan Indonesia dalam mengatasi permasalahan karhutla secara unilateral. Sesuai dengan anggapan neoliberal institusionalisme yang mengungkapkan bahwa keinginan negara untuk bekerja sama akan muncul dengan adanya bantuan dari institusi internasional, karena mekanisme kerja sama yang disediakan oleh institusi internasional dapat menguntungkan negara terutama dalam mengatasi permasalahan yang sulit untuk dilakukan secara unilateral. Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa upaya untuk menanggulangi karhutla yaitu dengan memberlakukan peraturan dalam pelarangan praktik pembukaan lahan dengan metode pembakaran namun penegakkan hukum yang lemah serta minimnya sinergi antara pemerintah dan aktor swasta membuat upaya ini masih belum bisa menekan kasus karhutla di Indonesia. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah berupa pembentukan MPA

serta Manggala Agni juga masih belum efektif karena minimnya pengetahuan teknis serta penerapan program yang efisien membuat kebijakan pencegahan karhutla yang telah diterapkan oleh Indonesia masih belum berhasil. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu untuk mengatasi permasalahan karhutla di negaranya. Karena itu, ketika Indonesia kembali mengalami kejadian karhutla pada tahun 2019, Indonesia menerima inisiasi rencana kerja sama oleh ITTO untuk mengatasi isu tersebut.

Pelaksanaan kerja sama ini merupakan bentuk upaya ITTO yang menjalankan fungsi-fungsinya sebagai organisasi internasional untuk membantu Indonesia mengatasi dan mencegah isu karhutla. Dalam menjalankan fungsi *rule creation*, ITTO menetapkan ketentuan kerja sama yang telah disepakati dengan Indonesia berdasarkan manual khusus yang dibentuk oleh ITTO. Hal ini membantu Indonesia dalam penyusunan proposal kerja sama sehingga tujuan dan target yang ingin dicapai relevan dengan kepentingan negara serta organisasi. ITTO juga berfungsi sebagai *rule supervision* untuk mengawasi dan memastikan seluruh ketentuan kerja sama dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani. Hasilnya Indonesia menepati perjanjian kerja sama yang telah dibentuk dengan menjalankan program pelatihan PLTB untuk masyarakat dan pelatihan pemadaman kebakaran untuk pasukan Manggala Agni di 3 provinsi target kerja sama. ITTO mengirimkan perwakilannya dalam menjalankan fungsi ini bukan hanya untuk mengamati jalannya kegiatan kerja sama namun juga melaporkan kendala yang dialami dalam proses kegiatan.

Selanjutnya, ITTO juga menjalankan fungsinya untuk menyediakan informasi agar dapat membantu Indonesia untuk mengatasi karhutla yaitu dengan memberikan panduan terkait pengajuan proposal dan pedoman untuk penerapan teknik manajemen hutan dan pemadaman karhutla yang efektif. ITTO juga menjadi wadah untuk Indonesia agar dapat menyampaikan kesulitan yang dihadapi dalam kerja sama melalui penyediaan forum internasional dan rapat pertemuan PSC sehingga para aktor terkait dapat saling mendiskusikan solusi untuk kendala yang dihadapi dalam proses kerja sama, ITTO juga menyelenggarakan webinar berskala internasional secara regional dengan aktor negara dan non-negara untuk saling berdiskusi dan berbagi pengalaman serta

pengetahuan dalam rangka menanggulangi isu karhutla khususnya di Indonesia. Terakhir, ITTO juga mengalokasikan dana bantuan dari Jepang untuk mensponsori kegiatan kerja sama dengan Indonesia termasuk memberikan fasilitas berupa alat pertanian dan perlengkapan keselamatan dalam pemadaman kebakaran serta mendukung pembentukan aplikasi khusus untuk Manggala Agni untuk meningkatkan kapasitas agen penanggulangan karhutla dalam menjalankan tugasnya melakukan patroli dan pencegahan kasus karhutla. ITTO juga memberikan bantuan teknis berupa pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan langsung oleh tim ahli yang dapat membantu MPA dan Manggala Agni meningkatkan pengetahuan dan kapasitasnya dalam mencegah karhutla.

Bantuan yang diberikan ITTO sebagai organisasi internasional telah mewujudkan kepentingan Indonesia untuk mengurangi kasus karhutla dan meningkatkan upaya pencegahan karhutla di negaranya. Hal ini ditunjukkan melalui hasil positif yang didapat setelah pelaksanaan kerja sama dimana angka luas area hutan dan lahan terbakar di Indonesia berkurang secara signifikan. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa dampak positif tersebut sepenuhnya terjadi hanya karena upaya dilakukan Indonesia dan ITTO saja. Namun, kontribusi yang telah diberikan oleh ITTO telah membawa Indonesia ke titik yang lebih baik dalam mencapai tujuannya untuk menanggulangi permasalahan karhutla.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa saran terkait pelaksanaan kerja sama Indonesia dan ITTO dalam pengendalian dan pencegahan isu karhutla.

1. Kepada Pemerintah Indonesia diharapkan agar dapat memastikan bahwa hasil kegiatan kerja sama yang telah dilaksanakan tetap dilanjutkan meskipun proyek kerja sama dengan ITTO dan Jepang telah berakhir. Terutama praktik PLTB dan patroli Manggala Agni pada area hutan dan lahan harus diawasi pelaksanaannya secara rutin untuk mengurangi resiko kebakaran di tahun-tahun berikutnya dan memperkuat upaya pencegahan karhutla di Indonesia

2. Kepada akademisi studi hubungan internasional, untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar mengkaji terkait upaya atau kerja sama lain yang dilakukan Indonesia dengan ITTO atau organisasi lain terkait karhutla, mengingat bahwa permasalahan karhutla dialami setiap tahunnya oleh Indonesia.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penelitian ini, termasuk dalam penyajian data serta deskripsi dan analisis upaya ITTO dalam mencegah karhutla di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2022 melalui pelaksanaan kegiatan kerja sama antara Indonesia dan ITTO terkait peningkatan kapasitas manajemen kebakaran hutan. Harapannya penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait upaya organisasi internasional antarpemerintah yaitu ITTO dalam menjalankan fungsinya untuk mengatasi dan mengatasi permasalahan lingkungan khususnya karhutla.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Krah, C. Y., & Perdinan. (2020). Forest Fires and Management Efforts in Indonesia (A Review). *Earth and Environmental Science*, 504.
- Ariyani, F., & Parameswari, P. (2020). Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di Indonesia dalam Penanganan Kebakaran Hutan di Indonesia Periode 2014-2019. *JOM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur*.
- BNPB, I. (2019, Desember 29). *Kerugian Kebakaran Hutan dan Lahan Sepanjang 2019 Capai Rp 75 Triliun*. BNPB. <https://bnpb.go.id/berita/kerugian-kebakaran-hutan-dan-lahan-sepanjang-2019-capai-rp-75-triliun>
- Bowman, D. M. J. S., Murphy, B. P., Neyland, D. L. J., Williamson, G. J., & Prior, L. D. (2014). Abrupt Fire Regime Change May Cause Landscape-Wide Loss of Mature Obligate Seeder Forests. *Global Change Biology*, 20.
- BPS. (2022). *Rekapitulasi Luas Penutupan lahan Hutan dan Non Hutan Menurut provinsi Tahun 2014-2021*. Badan Pusat Statistik.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods* (Fourth). Oxford University Press
- Carillo, R., Sarre, A., & Sato, K. (2015). ITTO Tropical Forest Update: Putting a brake on wildfire. *ITTO Tropical Forest Update*.
- CIFOR. (2017, Juni 23). *Why Peatlands Matter*. CIFOR; Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/006453>
- CNN Indonesia. (2019, Februari 10). *Titik Api Karhutla 2019 Naik 80 Persen dari 2018*. CNN Indonesia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (Fourth). SAGE Publications.

- Didvalis, L. (2014). Cooperation for Forest Protection in Southeast Asia: The Role of Japan and Its Domestic Interest Groups. *International Journal of Area Studies*, 9.
- Ditjenppi. (2014). *Indonesia Plays Dual Roles in Climate Change Issues—Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim*. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjenppi Menlhk). <http://ditjenppi.menlhk.go.id/dari-media/1291-indonesia-plays-dual-roles-in-climate-change-issues.html>
- Ditjenppi. (2020). *KERJASAMA ITTO-KLHK PADA FOREST FIRE PROJECT RESMI DIMULAI - Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3791-kerjasama-itto-klhk-pada-forest-fire-project-resmi-dimulai.html>
- Ditjenppi. (2021, Februari 21). *Kerjasama ITTO-KLHK pada Forest Fire Project Resmi Dimulai*. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjenppi Menlhk). <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3791-kerjasama-itto-klhk-pada-forest-fire-project-resmi-dimulai.html>
- Fachrie, M. (2020). Indonesia's Forest Fire and Haze Pollution: An Analysis of Human Security. *Malaysian Journal of International Relations*, 8.
- FAO. (2020). *The State of the World's Forests 2020*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). <https://doi.org/10.4060/CA8642EN>
- GFMC. (2002). *ITTO's Role in Tropical Forest Fire Management*. Global Fire Monitoring Center (GFMC).
- Giglio, L., Boschetti, L., Roy, D. P., Humber, M. L., & Justice, C. O. (2018). The Collection 6 MODIS Burned Area Mapping Algorithm and Product. *Elsevier, Remote Sensing of Environment*.
- Greenpeace. (2020). Karhutla dalam Lima Tahun Terakhir: Omnibus Law Hadiah Impunitas Bagi Pembakar di Sektor Perkebunan Terbesar. *Greenpeace*.
- Greenpeace. (2022). *Indonesia Forests*. *Greenpeace USA*. <https://www.greenpeace.org/usa/forests/indonesia/>
- Grieco, J. M. (1993). Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism. Dalam *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. Columbia University Press.

- KLHK. (2020). *Analisa Data Luas Areal Kebakaran Hutan & Lahan Tahun 2019*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KLHK. (2020). *Maklumat Bersama Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/57>
- KLHK. (2023). *Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Seluruh Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran>
- Kumalawati, R., Anjarini, D., & Elisabeth. (2019). Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. *Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)*.
- Kuswanti, R. (2020). Dampak Kebijakan Larangan Pembakaran Lahan terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat: Studi di Desa Mekar Jaya Kabupaten Pulang Pisau. *Universitas Palangka Raya*, 9. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/download/1533/1801/3118>
- Lamy, S. L. (2014). Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neo-liberalism. Dalam *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (Sixth). Oxford University Press.
- Loren, A., Ruslan, M., Yusran, F. H., & Rianawati, F. (2015). Analisis Faktor Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Upaya Pencegahan yang Dilakukan Masyarakat di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. *Universitas Lambung Mangkurat*.
- Menlhk. (2017, Oktober 22). *Tahun 2017, Luas kebakaran Hutan dan Lahan Menurut 71,5%*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/831
- Menlhk, (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). (2016). *Indonesia dan Uni Eropa Gelar Pekan Diplomasi Iklim*. Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3402/indonesia-dan-uni-eropa-gelar-pekan-diplomasi-iklim>
- Menlhk, (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). (2020, April 23). *PPID / Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019*. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5398/hutan-dan-deforestasi-indonesia-tahun-2019>

- Menlhk, (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). (2021, Mei 3). *The Path for Indonesian Tropical Forest for the World of Hope—Kementerian LHK*. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3947/the-path-for-indonesian-tropical-forest-for-the-world-of-hope
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edition). SAGE Publications.
- Muzaki, A., Pratiwi, R., & Az Zahro, S. R. (2021). Forest Fire Control Through Strengthening the Role of the Forest Police to Realize Sustainable Development Goals. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 1*.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Seventh). Pearson Education Limited.
- Redaksi Sawit Indonesia. (2021, Mei 10). *KLHK dan ITTO Selenggarakan Seri Pelatihan Praktik dan Pembangunan Demplot PLTB*. Majalah Sawit Indonesia. <https://sawitindonesia.com/klhk-dan-itto-selenggarakan-seri-pelatihan-praktik-dan-pembangunan-demplot-pltb/>
- Republika. (2021, November 27). *Indonesia Berpeluang Pimpin ITTO*. Republika Online.
- Robinne, F.-N. (2021). Impacts of Disasters on Forests, in Particular Forest Fires. *UNFFS Background Paper*.
- Satkuru, S. (2021). *Prevention of Forest Fires in the Tropics: ITTO Forest Fire Projects in Peru and Indonesia*. International Tropical Timber Organization (ITTO).
- Setkab. (2017, Januari 23). *Kerugian Kebakaran Hutan 2015 Rp220 Triliun, Presiden Jokowi Minta Tahun Ini Tidak Terulang Lagi*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/kerugian-kebakaran-hutan-2015-rp220-triliun-presiden-jokowi-minta-tahun-ini-tidak-terulang-lagi/>
- UNCTAD. (2004, Juli 23). *NEGOTIATIONS TO BEGIN ON A NEW TROPICAL TIMBER AGREEMENT / UNCTAD*. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). <https://unctad.org/press-material/negotiations-begin-new-tropical-timber-agreement>

- UNEP, U. N. E. P. (2022). *Spreading Like Wildfire: The Rising Threat of Extraordinary Landscape Fires*. United Nations Environment Programme (UNEP).
- UNFCCC. (1994). *Indonesia: The First National Communication on Climate Change Convention*. United Nations Framework Convention on Climate Change.
- UNFCCC. (2019). *UN Climate Change Conference—December 2019 | UNFCCC*. United Nations Framework Convention on Climate Change. <https://unfccc.int/conference/un-climate-change-conference-december-2019>
- Widyaningsih, T. S., & Awang, S. A. (2011). Critical Study of Community Empowerment Based on Forest Approach in ITTO Village Models Ciamis Regency. *Widyariset*, 14.
- Yudha, M. M. R., & Sari, V. P. (2023). Kerja Sama Japan International Cooperation Agency dan Indonesia dalam Proyek Mass Rapid Transit Jakarta Fase II. *Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR)*, 5.